

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022**

**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II  
Kabupaten Tasikmalaya Telp./Fax : (0265) 333156  
Website : [dinsospkbp3a.tasikmalayakab.go.id](http://dinsospkbp3a.tasikmalayakab.go.id)  
Email : [dinsospkbp3a@tasikmalayakab.go.id](mailto:dinsospkbp3a@tasikmalayakab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis dan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2022 serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Melalui analisis dan evaluasi yang dilakukan dalam Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kinerja Dinas pada tahun-tahun mendatang.

Singaparna, Desember 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TASIKMALAYA



DADAN WARDANA, S.IP, M.M.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690405 199603 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	4
1.2. STRUKTUR ORGANISASI .....	7
1.3. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA .....	8
1.4. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE).....	10
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	14
2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2022.....	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	27
3.2 REALISASI ANGGARAN .....	40
BAB IV PENUTUP.....	54
4.1 KESIMPULAN.....	54
4.2 PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH .....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya .....	7
Tabel 1.1	Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2022.....	8
Tabel 1.2	Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Tahun 2022.....	8
Tabel 1.3	Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2022 .....	9
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Utama Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.....	9
Tabel 1.5	Identifikasi Isu Strategis .....	11
Tabel.2.1	Rencana Strategis Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	16
Tabel.2.2	Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 .....	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 .....	24
Tabel 2.4	Program dan Alokasi Anggaran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 .....	25
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.....	27
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Pelaporan dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....	32
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Pelaporan dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	33
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan dengan Target Renstra 2021-2026 .....	34
Tabel 3.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 .....	36
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Pada Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya s/d Bulan Desember Tahun Anggaran 2022 .....	41
Tabel 4.1.	Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah selaku entitas akuntabilitas kinerja SKPD berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja tahunan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya atas penggunaan anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah selama kurun waktu tahun pelaporan.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi publik serta sebagai sarana evaluasi internal Dinas.

### **1.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Dinas Sosial, PPKB, P3A) Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.1.1. Kedudukan**

Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1.1.2. Tugas dan Fungsi**

Kedudukan, susunan organisasi beserta tugas dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah khususnya pada Bagian Sembilan Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

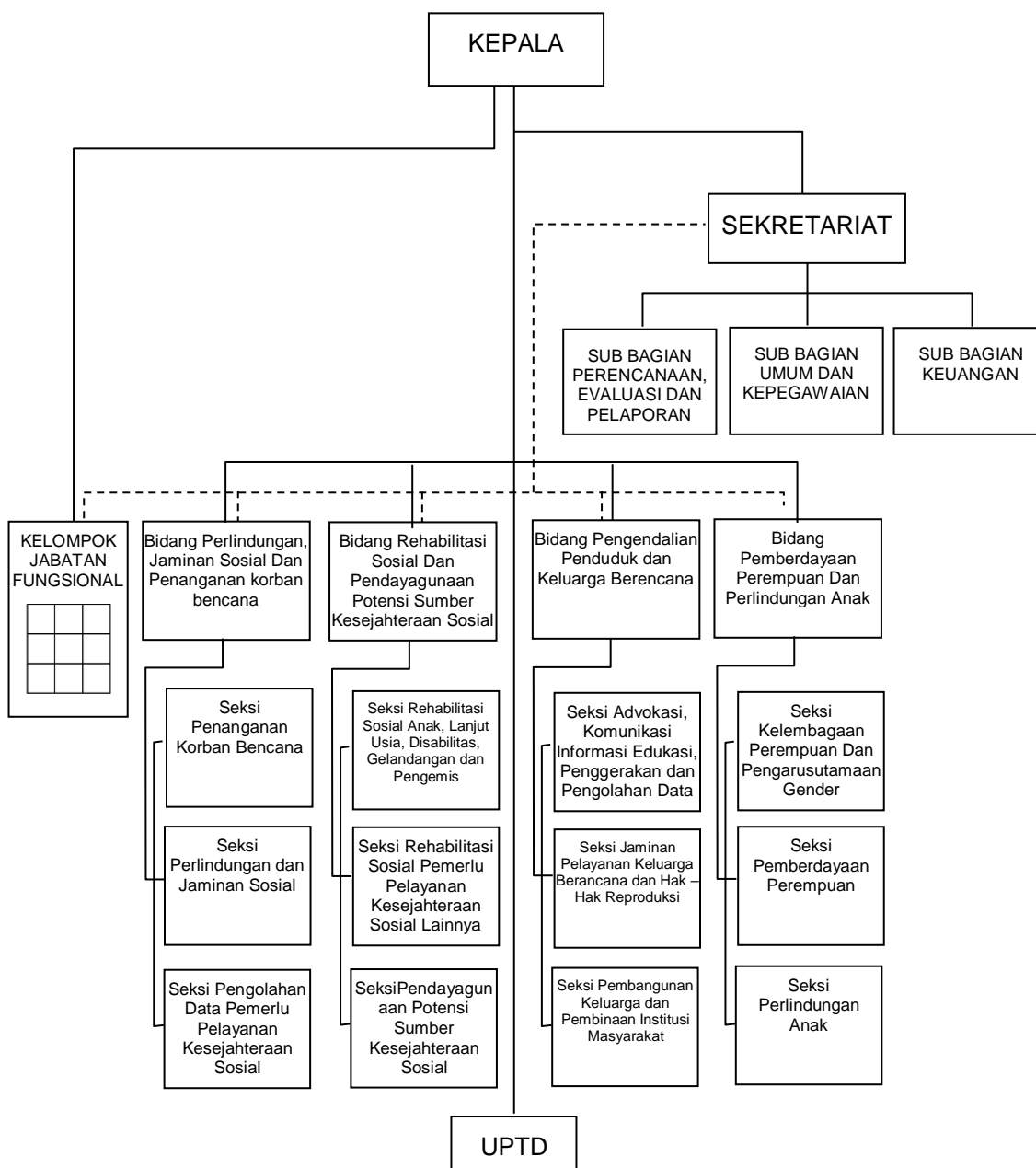
- a. Perumusan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, terdiri atas:
  1. Seksi Penanganan Korban Bencana;
  2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
  3. Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis;
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
  3. Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
  1. Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data;
  2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; dan
  3. Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
  1. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
  3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

**Gambar 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PPKB P3A**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**





### 1.3. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

#### 1.3.1. Aspek Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh 48 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan serta berdasarkan pangkat dan golongannya disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**

#### **Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2022**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	6	5	11
3	Bidang Linjamsos	6	2	8
4	Bidang Rehabsos	6	2	8
5	Bidang PPKB	6	2	8
6	Bidang PPPA	3	5	8
7	UPTD PPA	2	2	4
<b>Jumlah Total</b>		<b>30</b>	<b>18</b>	<b>48</b>

**Tabel 1.2**

#### **Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Tahun 2022**

No	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan						
			S3	S2	S1	D3	D2	SMA	SMP
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	11	-	2	7	-	-	2	-
3	Bidang Linjamsos	8	-	-	7	1	-	-	-
4	Bidang Rehabsos	8	-	1	6	-	-	1	-
5	Bidang PPKB	8	-	3	3	-	-	2	-
6	Bidang PPPA	8	-	2	5	1	-	-	-
7	UPTD PPA	4	-	1	2	-	-	1	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>48</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2022**

No	Unit Kerja	Jumlah	Pangkat, Golongan dan Ruang										
			Golongan IV			Golongan III			Golongan II				
			c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	11	-	1	1	3	4	-	1	1	-	-	-
3	Bidang Linjamsos	8	-	-	1	1	4	1	-	-	1	-	-
4	Bidang Rehabsos	8	-	-	1	1	3	-	3	-	-	-	-
5	Bidang PPKB	8	-	-	1	1	3	1	1	-	1	-	-
6	Bidang PPPA	8	-	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-
7	UPTD PPA	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>48</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 1.3.2. Aspek Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh sarana dan prasarana mobilitas dan operasional kantor sebagai penunjang kinerja aparatur yang secara umum dikelompokkan pada tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin utama, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya.

**Tabel 1.4**  
**Sarana dan Prasarana Utama Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah/ volume
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	
	- Tanah Kantor Dinas	1957 m2
	- Tanah Shelter/UPT PPPA	400 m2
	- Tanah Negara Milik Adat C No 2666 Persil No 162 Milik Prov Desa Pakemitan Kec Cikatomas	371 m2
<b>2</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	
	- Gedung Kantor Dinas	1957 m2
	- Gedung Shelter/UPT PPPA	60 m2
	- Gedung Balai Penyuluhan KB Kec Manonjaya, Kec Taraju, Kec Cikatomas, Kec Karangnunggal, Kec Ciawi dan Kec Singaparna	300 m2
<b>3</b>	<b>Peralatan dan Mesin Utama</b>	
	- Meja Kerja Eselon II	1 unit
	- Kursi Kerja Eselon II	1 unit

	- Kursi Kerja Eselon III	4 unit
	- Meja Biro	24 unit
	- Meja ½ Biro	13 unit
	- Meja Rapat	8 unit
	- Lemari	20 unit
	- Filing Kabinet	13 unit
	- Kursi Putar	41 unit
	- Kursi Sice/Sofa	3 unit
	- Kursi Kayu	4 unit
	- Kursi Rapat	1 unit
	- Smart TV	2 unit
	- TV	9 unit
	- AC	12 unit
	- Laptop / Note Book	43 / 16 unit
	- Komputer	44 unit
	- Printer	61 unit
	- Komputer Server	2 unit
	- Mesin Penghancur Kertas	5 unit
	- Kendaraan Roda 6	- unit
	- Kendaraan Roda 4	13 unit
	- Kendaraan Roda 3	1 unit
	- Kendaraan Roda 2	79 Unit
	- Alat Kedokteran dan KB	1904 unit
<b>4</b>	<b>Jaringan dan Irigasi</b>	
	- Jaringan Internet	1 unit
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
	- Tenda Pengungsi	
	- Dapur Umum Bencana	

#### 1.4. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu-isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Identifikasi isu-isu strategis berdasarkan urusan pembangunan yang diselenggarakan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 1.5**  
**Identifikasi Isu Strategis**

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
I	Urusan Sosial		
1	Inter nasional <i>Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>	<p>Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya</p> <p>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH</p> <p>Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial korban bencana sosial</p>	Adanya upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Pronangkis
2	Nasional	<p>Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat</p> <p>Penguatan dan pengembangan Puskesmas</p> <p>Peningkatan Profesionalisme SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial</p>	<p>Adanya pembenahan DTKS</p> <p>Adanya kuota tambahan penerimaan bantuan sosial bersyarat</p> <p>Adanya perhatian dari pemangku kepentingan di daerah dalam penguatan dan pengembangan Puskesmas</p> <p>Bertambahnya jumlah relawan sosial, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi keahlian</p>
3	Daerah	<p>Penguatan pengelolaan DTKS sebagai dasar acuan penerima bantuan sosial pemerintah</p> <p>Penguatan pendampingan, konsolidasi, koordinasi, monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat</p> <p>Pemenuhan SPM urusan bidang sosial secara menyeluruh</p> <p>Peningkatan peran dan konsolidasi UPCPK, SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke pendidikan dan kesehatan dasar</p>	<p>Pemadanan DTKS dengan data NIK pada Disdukcapil serta verifikasi dan validasi data penerima bantuan secara berkala</p> <p>Peningkatan koordinasi dan konsolidasi Tikor Kabupaten dan Tikor Kecamatan dalam monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat</p> <p>Pemenuhan SPM dilaksanakan sesuai dengan regulasi tentang tata cara pemenuhan SPM</p> <p>Adanya sinergitas UPCPK, SLRT dan Puskesmas dalam verifikasi lapangan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p>

II	Urusan PPPA		
1	Inter nasional <i>Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>	Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan	Adanya perhatian dari pemangku kepentingan terkait penyusunan kebijakan responsif gender
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Adanya penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Meningkatnya pemberdayaan kaukus politik bagi perempuan
2	Nasional	Peningkatan kualitas PUG dalam pembangunan	Meningkatnya capaian IPG dan IDG serta diraihnya anugerah APE
3	Daerah	Peningkatan skor capaian KLA	Adanya penguatan dan pengembangan Desa Layak Anak dan Forum Anak Daerah serta pelaksanaan Self Assesmen capaian KLA
		Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga	Adanya peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok PEKKA dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui P2WKAA
III	Urusan PPKB		
1	Inter nasional <i>Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	
		Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam ber-KB
		Unmet Need KB (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern			
2	Nasional	Peningkatan penyelenggaraan Program Bangga Kencana	Meningkatnya jumlah daerah yang telah menyusun dokumen GDPK
			Penguatan dan pengembangan Kampung KB dan Rumah Dataku
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB
			Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

3	Daerah	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber-KB dan penurunan angka stunting	Meningkatnya akseptor KB
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam ber-KB
			Meningkatnya advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui petugas lini lapangan

Setelah isu strategis dapat diidentifikasi, selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap isu-isu strategis tersebut. Pembobotan dilakukan melalui FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis dan menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Dari hasil FGD, diperoleh penentuan skor untuk kriteria isu strategis sebagai berikut.

### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Isntansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya beserta penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsinya, permasalahan utama (strategic issue) serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja;

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan mengenai ringkasan/ikhtisar perjanjian pada tahun pelaporan;

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya pada tahun pelaporan dengan analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan;

**BAB IV : PENUTUP**

Merupakan rangkuman dan kesimpulan umum atas capaian kinerja beserta permasalahan dan solusi;

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program, kegiatan, anggaran serta target pencapaian.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Tasikmalaya melakukan perampingan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahannya dari 24 OPD menjadi 20 OPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan SOTK tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya untuk efektivitas kinerja pemerintah dan efisiensi pembiayaan atau modal belanja, berdasarkan SOTK baru semula Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos, PMD P3A) menjadi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB P3A)

Kedudukan, susunan organisasi beserta tugas dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah khususnya pada Bagian Sembilan Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2.1. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **2.1.1. Rencana Strategis Dinsos PPKB P3A Tahun 2021 - 2026**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dari mulai strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

**“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”.**

*Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:*

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan Iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

Dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya Dinas Sosial PPKB P3A secara umum di susun Rencana Strategis untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program program prioritas.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis kondisi saat ini dalam upaya melakukan proyeksi kondisi pada masa depan serta sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah selama kurun waktu kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.



Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Tujuan Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- 2) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Sasaran (*objective*) yang dimaksud dalam Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu satu sampai lima tahun serta diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya terdapat pada Misi 1, yaitu : “Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah”.

**Tabel 2.1**  
**Rencana Strategis Dinas Sosial PPKB P3A**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
1.	T-1: Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	S-1 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%
		S-2 Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	%
		S-3 Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%
		S-4 Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%

2.	T-2 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	S-5 Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin
3.	T-3 : Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	S-6 Meningkatkan Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	%
		S-7 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin

## 2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2022

### 2.2.1. Rencana Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Tahun 2022

Rencana Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya mencakup Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja (Renja) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) berikut rencana capaiannya (target). Secara lengkap disajikan dalam lampiran Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan menuntun pada hasil-hasil yang diinginkan dan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan organisation progress.

Dinas Sosial PPKB P3A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022 melaksanakan 49 Sub Kegiatan dan 28 kegiatan yang tercakup dalam 12 program, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

**Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	BESAR ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>95.000.000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	4 Dokumen	75.000.000	DAU
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	6 Laporan	20.000.000	DAU
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5.810.245.074</b>	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	50 Orang/Bulan	5.810.245.074	DAU
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>282.473.500</b>	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Paket	25.000.000	DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Paket	60.000.000	DAU
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Dokumen	25.000.000	DAU
7	Penyediaan Bahan/Material	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Paket	33.832.000	DAU
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Laporan	35.500.000	DAU
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Laporan	103.141.500	DAU
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>459.335.000</b>	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Laporan	154.035.000	DAU
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Laporan	305.300.000	DAU
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>309.406.500</b>	

12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	118 Unit	254.858.500	DAU
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Unit	19.500.000	DAU
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Unit	35.048.000	DAU
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>234.000.000</b>	
15	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	39 Orang	234.000.000	DAU
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>2.014.450.000</b>	
16	Penyediaan Permakanan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	9150 Orang	1.330.800.000	DAU
17	Penyediaan Sandang	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1000 Orang	500.000.000	DAU
18	Penyediaan Alat Bantu	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	200 Orang	183.650.000	DAU
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>			<b>440.423.200</b>	
19	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	4023 Orang	163.000.000	DAU
20	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Shelter, 60 Orang	157.423.200	DAU
21	Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	300 Orang	120.000.000	DAU
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>4.116.568.871</b>	
22	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	858729 Keluarga	168.062.500	DAU
23	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	870 Keluarga	3.538.876.371	DAU
24	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	99 Orang	409.630.000	DAU
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			<b>490.435.000</b>	
25	Penyediaan Makanan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1445 Orang	490.435.000	DAU

	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>			<b>654.080.000</b>	
26	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	52 Orang	654.080.000	DAU
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>400.000.000</b>	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	400.000.000	DAU
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>100.000.000</b>	
28	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	100.000.000	DAU
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>350.000.000</b>	
29	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	29 Orang	350.000.000	DAU
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>112.950.000</b>	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	112.950.000	DAK
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>262.044.000</b>	
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	270 Layanan	262.044.000	DAK
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>76.806.000</b>	
32	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	270 Orang	76.806.000	DAK

	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>151.800.000</b>	
33	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Laporan	151.800.000	DAU
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>150.000.000</b>	
34	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Layanan	150.000.000	DAU
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>250.000.000</b>	
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	250.000.000	DAU
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>600.000.000</b>	
36	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	54 Orang	600.000.000	DAU
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			<b>260.000.000</b>	
37	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	260.000.000	DAU
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>155.970.000</b>	
38	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	10 Unit	155.970.000	DAK
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>			<b>1.112.915.000</b>	
39	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	10 Dokumen	140.015.000	DAK

40	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Laporan	972.900.000	DAK
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>			<b>1.684.800.000</b>	
41	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	4563 Orang	1.684.800.000	DAK
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2.490.732.000</b>	
42	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	41 Laporan	18.900.000	
43	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	3884 Orang	1.191.232.000	
44	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	40 Unit	1.265.000.000	DAK
45	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	40 Laporan	15.600.000	DAU
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>			<b>6.158.250.000</b>	
46	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	351 Kampung	6.158.250.000	DAK
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>9.334.432.000</b>	
47	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	771 Unit	620.132.000	DAK
48	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	286 Orang	250.000.000	DAU
49	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	39 Kelompok	8.464.300.000	DAK
<b>JUMLAH</b>				<b>38.557.116.145</b>	

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Tasikmalaya) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A disusun dengan memperhatikan Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial PPKB P3A Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Selanjutnya, dari 7 (Tujuh) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator sasaran yang tertulis dalam Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial PPKB P3A Tahun 2021-2026. Tujuh indikator sasaran tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kabupaten yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022 telah menetapkan



Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tasikmalaya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran Dinas untuk tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga target kinerja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	66,94 %
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %
3.	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %
4.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,13 %
5.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	64,23 Poin
6.	Meningkatnya kepesertaan KB pembangunan	Rasio akseptor KB	71,18 %
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	40,00 Poin

Sebagai upaya mendukung pencapaian target kinerja sasaran, Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 8 (Delapan) program dengan total anggaran sebesar Rp. 33.575.376.378,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Rincian program dan besaran anggaran per program tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Program dan Alokasi Anggaran Dinas Sosial PPKB P3A**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.356.477.378
2	Program Rehabilitasi Sosial	2.045.000.000
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.625.000.000
4	Program Penanganan Bencana	1.210.000.000
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	500.000.000
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	301.800.000
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	850.000.000
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	20.687.099.000
<b>Jumlah</b>		<b>33.575.376.378</b>

Besaran anggaran per urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Sosial;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial sebesar Rp. 4.880.000.000,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau sebesar 14,53% dari total anggaran Dinas, yang terdiri dari 3 (tiga) program, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Rehabilitasi Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 2.045.000.000,- (dua milyar empat puluh lima juta rupiah);
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- c. Program Penanganan Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).

2. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebesar Rp. 20.687.099.000,- (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) atau sebesar 61,61% dari total anggaran Dinas, yang terdiri dari 1 (satu) program dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pembinaan Keluarga Berencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.687.099.000,- (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebesar Rp. 1.651.800.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau dengan persentase sebesar 4,92% dari total anggaran Dinas, yang terdiri dari 3 (tiga) program dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 301.800.000,- (tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

4. Urusan Penunjang;

Total alokasi anggaran Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk penyelenggaraan urusan penunjang adalah sebesar Rp. 6.356.477.378,- (enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau dengan persentase sebesar 18,93%, yang terdiri dari 1 (satu) program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.356.477.378,- (enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Selanjutnya Perjanjian Kinerja diikuti oleh seluruh pejabat struktural Eselon III dan IV hingga pelaksana secara berjenjang dan secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

#### 3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial,  
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun  
2022

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB P3A**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	5	6
1	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	66,94	57,96
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	%	100,00	100,00
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	100,00
4	Persentase PPKS yang Tertangani	%	4,13	4,13

5	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64,23	Belum keluar nilai dari BPS pusat
6	Rasio Akseptor KB	%	71,18	79,07
7	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	Poin	40,00	50,01

Perkembangan beberapa capaian sasaran urusan sosial, urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2022, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial;

Masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, penyandang disabilitas terlantar di luar panti, gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti.

Sedangkan yang menjadi pembaginya adalah jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial (fakir miskin, lanjut usia terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, penyandang disabilitas terlantar di luar panti, gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar.

Maka, formulasi / perhitungan capaian kinerja dari indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\left( \frac{\text{jumlah PPKS yang memperoleh sosial pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}} \right) \times 100$$

$$\left( \frac{849122 \text{ orang}}{1465090 \text{ orang}} \right) \times 100 = 57,96\%$$

Rincian target, capaian kinerja dan persentase capaian kinerja untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Target Renstra	Realisasi	% Capaian
fakir miskin	Orang	1.465.090	849.122	57,96
Lansia	Orang	8.300	8.300	100
anak	Orang	2.000	2.000	100
Disabilitas	Orang	1.000	1.000	100
Gepeng	Orang	50	50	100
<b>Jumlah</b>		<b>1.476.440</b>	<b>860.472</b>	<b>58,28</b>

Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2022 terealisasi sebesar 57,96% dari target tahun 2022 sebesar 66,94% atau dengan persentase capaian sebesar 58,28%. Tidak tercapainya target kinerja sasaran pada tahun 2022 dikarenakan adanya kebijakan Rasionalisasi anggaran, dimana kegiatan yang sebelumnya ditujukan untuk pencapaian kinerja sasaran dimaksud dialihkan menjadi kegiatan/belanja tidak terduga.

Realisasi tahun 2022 ini sebenarnya meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang hanya sebesar 42,00%. Ini dikarenakan meningkatnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS yang pada tahun 2022 sebanyak 849.122 orang sementara pada tahun 2021 sebanyak 351.158 orang. Hal ini merupakan wujud peningkatan perhatian dari para pemangku kepentingan dalam meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah;

$$\left( \frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}} \right) \times 100$$

$$\left( \frac{16278 \text{ jiwa}}{16278 \text{ jiwa}} \right) \times 100 = 100,00\%$$

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan Berita Acara/Laporan Kejadian Bencana yang disampaikan oleh Kecamatan beserta unsur Muspika Kecamatan, jumlah laporan kejadian bencana pada tahun 2022 sebanyak 393 kejadian bencana alam dan bencana sosial, dengan total jumlah korban sebanyak 4.908 KK/16.278 jiwa yang seluruhnya telah menerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

Tercapainya target kinerja pada tahun 2022 dikarenakan telah terpenuhinya penyediaan paket bantuan bagi korban bencana sesuai dengan estimasi kebutuhan yang telah diperhitungkan.

3. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;

$$\left( \frac{\text{jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 (Satu) tahun}}{\text{jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}} \right) \times 100$$

$$\left( \frac{11350 \text{ jiwa}}{11350 \text{ jiwa}} \right) \times 100 = 100,00\%$$

Rincian target, capaian kinerja dan persentase capaian kinerja untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Target Renstra	Realisasi	% Capaian
Lansia	Orang	8.300	8.300	100
anak	Orang	2.000	2.000	100
Disabilitas	Orang	1.000	1.000	100
Gepeng	Orang	50	50	100
<b>Jumlah</b>		<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>100</b>

Penanganan penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang sudah ditangani pada tahun 2022 dan terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditentukan dan menyamai capaian pada tahun 2021.

#### 4. Persentase PPKS yang tertangani;

$$\left( \frac{\text{jumlah PPKS lainnya yang tertangani}}{\text{jumlah PPKS yang memerlukan penanganan dalam 1 tahun}} \right) \times 100$$

$$\left( \frac{40 \text{ kasus}}{40 \text{ kasus}} \right) \times 100 = 100,00\%$$

PPKS yang dimaksud disini merupakan kelompok PPKS diluar fakir miskin, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana yang telah diuraikan dalam indikator kinerja sebelumnya. Persentasi PPKS yang tertangani pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditentukan dan menyamai capaian pada tahun 2021.

Kasus PPKS yang terjadi dan memerlukan penanganan pada tahun 2022 adalah sebanyak 40 kasus, yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) kasus anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, 5 (Lima) kasus orang terlantar di luar daerah, 1 (satu) kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan 3 (Tiga) kasus bullying.

Kasus-kasus PPKS tersebut telah dapat ditangani oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan didukung oleh tenaga relawan dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang diantaranya adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Penggerak Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti Sosial dan relawan sosial lainnya.

5. Indek Pemberdayaan Gender (IDG);

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2022 mempunyai target nilai sebesar 64,23 poin sementara realisasi nilainya belum keluar sampai saat pembuatan Laporan, Dikarenakan BPS Pusat yang mengeluarkan IPG & IDG.

6. Rasio Akseptor KB

$$\left( \frac{\text{jumlah PUS yang ingin ber – KB tetapi tidak terlayani}}{\text{jumlah pasangan usia subur}} \right) \times 100$$

$$\left( \frac{206.256 \text{ orang}}{260.844 \text{ orang}} \right) \times 100 = 79,07\%$$

7. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 terealisasi dengan nilai 50,01.

**3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan realisasi capaian kinerja pada tahun pelaporan dengan realisasi tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut ini.



**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Pelaporan dengan**  
**Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun		
			2020	2021	2022
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	2,67	41,70	57,96
2	Persentase PMKS yang mene rima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,09	-	-
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100,00	100,00	-
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	-	-	100,00
6	Persentase PMKS yang tertangani	%	100,00	100,00	4,13
7	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	90,00	100,00	-
8	Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status /skor	Pratama dengan skor 505	Pratama dengan skor 505	-
9	Capaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kate gori	Pratama	n/a	-
10	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	-	-	Belum keluar nilai dari BPS pusat
11	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	83,33	-	-
12	Persentase Posyandu aktif	%	98,11	-	-
13	Cakupan Pembinaan dan Pembentukan BUMDES	%	96,01	-	-
14	Persentase Pasar Desa aktif	%	14,53	-	-
15	Rasio Akseptor KB	%	-	71,90	79,07
16	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	%	60,34	n/a	50,01

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Pelaporan dengan**  
**Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun		Percepatan/ Perlambatan
			2021	2022	
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	41,70	57,96	16,26
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	0
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	-	100,00	100,00
4	Persentase PMKS yang tertangani	%	4,12	4,13	0,01
5	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	-	-
6	Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status /skor	Pratama dengan skor 505	-	-
7	Rasio Akseptor KB	%	71,90	79,07	7,17
8	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	%	69,96	n/a	n/a

**3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi capaian kinerja pada tahun pelaporan terhadap target Renstra Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan dengan Target Renstra 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian Th. 2021 trhdp Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	66,94	57,96	86,58	67,60	85,74
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Pada Saat dan Setelah Masa Tanggap Darurat Bencana Daerah	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Masa Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang Tertangani	%	4,13	4,13	100,00	4,35	94,94
5	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64,23	Belum keluar nilai dari BPS pusat	-	64,42	-
6	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	%	71,18	79,07	111,08	72,61	108,90
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	40,00	50,01	50,01	70,00	71,44

#### **3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Hasil analisis dari perbandingan capaian kinerja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya tahun pelaporan dan tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.3 diatas, adalah sebagai berikut :

- a. Total indikator sasaran kinerja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 8 (delapan) indikator sasaran;
- b. Jumlah indikator sasaran yang mengalami peningkatan kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu indikator sasaran nomor 1,4,dan 7;
- c. Jumlah indikator sasaran yang menyamai dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebanyak 1 (satu) indikator sasaran, yaitu indikator sasaran nomor 2;
- d. Jumlah indikator sasaran yang tidak ada pada tahun sebelumnya sebanyak 1 (satu) indikator sasaran, yaitu indikator sasaran nomor 3;
- e. Jumlah indikator sasaran yang ada pada tahun sebelumnya dan pada tahun pelaporan tidak muncul kembali sebanyak 1 (satu) indikator sasaran, yaitu indikator sasaran nomor 5;
- f. Jumlah indikator sasaran yang telah menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu indikator sasaran nomor 6; dan
- g. Jumlah indikator sasaran yang belum keluar nilainya pada saat tahun pelaporan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran yaitu indikator sasaran nomor 8;

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya, sebagian telah dapat menyamai capaian kinerja tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 12,5%, yang melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 37,5%, sisanya indikator kinerja sasaran ada yang tidak muncul kembali lalu ada yang belum keluar nilainya disaat tahun pelaporan serta ada yang pada tahun sebelumnya tidak ada menjadi ada.

**Analisis Penyebab Keberhasilan** peningkatan kinerja dari 3 (tiga) indikator sasaran sebagaimana disebut dalam poin b. diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial

ANALISIS :

Capaian kinerja Indikator sasaran ini pada tahun pelaporan terealisasi sebesar 57,96%, meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 41,70%. Peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Hal ini merupakan wujud peningkatan perhatian dari para pemangku kepentingan dalam meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Persentase PMKS yang tertangani

ANALISIS :

Capaian kinerja Indikator sasaran ini pada tahun pelaporan terealisasi sebesar 4,13%, meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 4,12%. Peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS

3. Rasio Akseptor KB

ANALISIS :

Capaian kinerja indikator sasaran ini pada tahun pelaporan terealisasi sebesar 79,07%, meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 71,90%. Peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan Meningkatnya Kepesertaan KB.

### 3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun pelaporan disajikan pada Tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3.5**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (% / skor)	Penye rapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial	86,58	98,47	-11,89

2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Pada Saat dan Setelah Masa Tanggap Darurat Bencana Daerah	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah Masa Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	100,00	<b>96,57</b>	4,43
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100,00	93,48	6,52
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS yang Tertangani	100,00	94,25	5,75
5	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	76,85	473,15
6	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	111,08	100,00	n/a
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50,01	26,95	44,95

Dari Tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, 5 (lima) diantaranya memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi dan 1 (satu) indikator kinerja lainnya memiliki tingkat efisiensi yang rendah, yaitu Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial.

### 3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja per indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial, pada tahun pelaporan didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
  - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :
    - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah Masa Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota didukung oleh 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
  - a. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan :
    - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota; dan
    - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
  
3. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar didukung oleh 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
  - a. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan :
    - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan
    - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
  
4. Persentase PPKS yang Tertangani didukung oleh 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
  - a. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan :
    - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan
    - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
  
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung oleh 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :
  - a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan :
    - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota;
    - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
    - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.

- b. Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan :
    - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
    - Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
    - Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
  - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan kegiatan :
    - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; dan
    - Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - d. Program Pemenuhan Hak Anak, dengan kegiatan :
    - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota; dan
    - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota.
6. Rasio Akseptor KB didukung oleh 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :
- a. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan :
    - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk; dan
    - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan kegiatan :
    - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
    - Pendayagunaan Tenga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
    - Pengendalian dan pendistribusian ALat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota; dan



- Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan :
  - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- 7. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan :
    - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Dinas Sosial, PPKB,P3A Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu : urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Jumlah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran sebanyak 12 (Dua Belas) program dengan 28 (Dua Puluh Delapan) kegiatan. Total anggaran pembangunan yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya s/d Bulan Desember sebesar **Rp. 38.557.116.145,-** (tiga puluh delapan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus enam belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 29.635.817.685,-** (dua puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau dengan persentase sebesar **76,86%**.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran per program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Bulan Desember tahun anggaran 2022, disajikan pada Tabel.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial PPKB**  
**P3A Kabupaten Tasikmalaya s/d Bulan Desember Tahun Anggaran 2022**

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>6.956.460.074</b>	<b>6.597.519.148</b>	<b>94,84</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>95.000.000</b>	<b>92.539.600</b>	<b>97,41</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	72.799.600	97,07
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.740.000	98,70
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.810.245.074</b>	<b>5.462.934.008</b>	<b>94,02</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.810.245.074	5.462.934.008	94,02
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>282.473.500</b>	<b>278.898.900</b>	<b>98,73</b>
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	59.201.500	98,67
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	100,00
7	Penyediaan Bahan Material	33.832.000	33.488.400	98,98
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.500.000	35.475.000	99,93
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.141.500	100.734.000	97,67
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>459.335.000</b>	<b>454.055.140</b>	<b>98,85</b>
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.035.000	153.755.140	99,82
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.300.000	300.300.000	98,36
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>309.406.500</b>	<b>309.091.500</b>	<b>99,90</b>
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.858.500	254.612.300	99,90
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	19.500.000	100,00
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.048.000	34.979.200	99,80
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>234.000.000</b>	<b>234.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>234.000.000</b>	<b>234.000.000</b>	<b>100,00</b>
15	Peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	234.000.000	234.000.000	100,00

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>2.454.873.200</b>	<b>2.298.173.600</b>	<b>93,62</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>2.014.450.000</b>	<b>1.883.087.750</b>	<b>93,48</b>
16	Penyediaan Perumahan	1.330.800.000	1.238.390.250	93,06
17	Penyesiaan sandang	500.000.000	482.329.000	96,47
18	Penyediaan Alat Bantu	183.650.000	162.368.500	88,41
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>440.423.200</b>	<b>415.085.850</b>	<b>94,25</b>
19	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	163.000.000	149.000.000	91,41
20	Pemberian Layanan Kedaruratan	157.423.200	148.939.200	94,61
21	Pemberian layanan Rujukan	120.000.000	117.146.650	97,62
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>4.116.568.871</b>	<b>4.053.626.851</b>	<b>98,47</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>4.116.568.871</b>	<b>4.053.626.851</b>	<b>98,47</b>
22	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	168.062.500	166.119.700	98,84
23	Fasilitas Bantuan sosial kesejahteraan keluarga	3.538.876.371	3.513.734.786	99,29
24	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	409.630.000	373.772.365	91,25
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>1.144.515.000</b>	<b>1.105.207.790</b>	<b>96,57</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</b>	<b>490.435.000</b>	<b>454.757.790</b>	<b>92,73</b>
25	Penyediaan Makanan	490.435.000	454.757.790	92,73
	<b>Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>654.080.000</b>	<b>650.450.000</b>	<b>99,45</b>
26	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	654.080.000	650.450.000	99,45
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>850.000.000</b>	<b>842.656.400</b>	<b>99,14</b>
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>400.000.000</b>	<b>394.921.650</b>	<b>98,73</b>
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	400.000.000	394.921.650	98,73
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	<b>97.734.750</b>	<b>97,73</b>

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
28	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000	97.734.750	97,73
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100,00</b>
29	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	350.000.000	350.000.000	100,00
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>451.800.000</b>	<b>364.359.000</b>	<b>80,65</b>
	<b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>112.950.000</b>	<b>112.347.000</b>	<b>99,47</b>
30	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.950.000	112.347.000	99,47
	<b>Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>262.044.000</b>	<b>182.442.000</b>	<b>69,62</b>
31	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	262.044.000	182.442.000	69,62
	<b>Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>76,806.000</b>	<b>69.570.000</b>	<b>90,58</b>
32	Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	76,806.000	69.570.000	90,58
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>301.800.000</b>	<b>300.886.500</b>	<b>99,70</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>151.800.000</b>	<b>150.886.500</b>	<b>99,40</b>
33	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	151.800.000	150.886.500	99,40
	<b>Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100,00</b>
34	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	100,00
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>850.000.000</b>	<b>848.266.000</b>	<b>99,80</b>

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>250.000.000</b>	<b>248.266.000</b>	<b>99,31</b>
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	250.000.000	248.266.000	99,31
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100,00</b>
36	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	600.000.000	600.000.000	100,00
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>415.970.000</b>	<b>154.454.224</b>	<b>37,13</b>
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk</b>	<b>260.000.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1,33</b>
37	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	260.000.000	3.450.000	1,33
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>155.970.000</b>	<b>151.004.224</b>	<b>96,82</b>
38	Membentuk Rumah Data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	155.970.000	151.004.224	96,82
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>11.446.697.000</b>	<b>8.700.587.372</b>	<b>76,91</b>
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.112.915.000</b>	<b>1.081.809.122</b>	<b>97,21</b>
39	Promosi dan KIE program KKBPK melalui Media massa cetak dan elektronik serta media di luar ruang	140.015.000	126.563.900	90,39
40	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	972.900.000	955.245.222	98,19
	<b>Pendayagunaan Tenga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.684.800.000</b>	<b>1.684.800.000</b>	<b>100,00</b>
41	Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.684.800.000	1.684.800.000	100,00
	<b>Pengendalian dan pendistribusian ALat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.490.732,000</b>	<b>1.271.078.250</b>	<b>51,03</b>
42	Pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan sarana penunjang layanan KB ke fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.900.000	18.624.000	98,54
43	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.191.232.000	1.073.107.850	90,08
44	Penyediaan sarana penunjang Pelayanan KB	1.265.000.000	163.756.400	12,95

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
45	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	15.600.000	15,590.000	99,94
	<b>Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>6.158.250.000</b>	<b>4.662.900.000</b>	<b>75,72</b>
46	Integrasi Pembangunan Lintas sektor di Kampung KB	6.158.250.000	4.662.900.000	75,72
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>9.334.432.000</b>	<b>4.136.080.800</b>	<b>44,31</b>
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga</b>	<b>9.334.432.000</b>	<b>4.136.080.800</b>	<b>44,31</b>
47	Pengadaan Sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	620.132.000	570.350.000	91,97
48	Orientasi / Pelatihan teknis pelaksana / kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	250.000.000	249.552.000	99,82
49	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.464.300.000	3.316.178.800	39,18
<b>JUMLAH</b>		<b>38.557.116.145</b>	<b>29.635.817.685</b>	<b>76,86</b>

**Penjelasan :**

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**, pagu anggaran sebesar Rp. 6.956.460.074,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh puluh empat Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 6.597.519.148,- (enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,84%. Program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan, yaitu :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 92.539.600,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,41%;
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 5.810.245.074,- (lima milyar delapan ratus sepuluh juta

dua ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) terealisasi sebesar Rp. 5.462.934.008 (lima milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,02%;

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 282.473.500,- (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 278.898.900,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,73%;
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 459.335.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 454.055.140,- (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,85%; dan
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 309.406.500,- (tiga ratus Sembilan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 309.091.500,- (tiga ratus Sembilan juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,90%.

**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**, pagu anggaran sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%.

**3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**, pagu anggaran sebesar Rp. 2.454.873.200,- (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.298.173.600,- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,62%. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, pagu anggaran sebesar Rp. 2.014.450.000,- (dua milyar empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.883.087.750,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh

tiga juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 93,48%; dan

- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, pagu anggaran sebesar Rp. 440.423.200,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 415.085.850,- (empat ratus lima belas juta delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,25%.

4. **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**, pagu anggaran sebesar Rp. 4.116.568.871,- (empat milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.053.626.851,- (empat milyar lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,47%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 4.116.568.871,- (empat milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.053.626.851,- (empat milyar lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,47%.

5. **PROGRAM PENANGANAN BENCANA**, pagu anggaran sebesar Rp. 1.144.515.000,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.105.207.790,- (satu milyar seratus lima juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,57%. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 490.435.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 454.757.790,- (empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 92,73%; dan
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 654.080.000,- (enam ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 650.450.000,- (enam ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,45%.



**6. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN**

**PEREMPUAN**, pagu anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 842.656.400,- (delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,14%. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 394.921.650,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,73%;
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 97.734.750,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,73%; dan
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%.

**7. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**, pagu anggaran sebesar Rp.

451.800.000,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 364.359.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 80,65%. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 112.950.000,- (seratus dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 112.347.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,47%;
- b. Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 262.044.000,- (dua ratus enam puluh dua juta empat puluh empat ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 182.442.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 69,62%; dan
- c. Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu

anggaran sebesar Rp. 76,806.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 69.570.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90,58%.

**8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**, pagu anggaran sebesar Rp. 301.800.000,- (tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 300.886.500,- (tiga ratus juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,70%. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 151.800.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 150.886.500,- (seratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,40%; dan
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%.

**9. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**, pagu anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 848.266.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,80%. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 248.266.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99,31%; dan
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%.

**10. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**, pagu anggaran sebesar Rp. 415.970.000,- (empat ratus lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 154.454.224,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 37,13%. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk, pagu anggaran sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 1,33%; dan
- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 155.970.000,- (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 151.004.224,- (seratus lima puluh satu juta empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96,82%.

**11. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**, pagu anggaran sebesar Rp. 11.446.697.000,- (sebelas milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 8.700.587.372,- (delapan milyar tujuh ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 76,91%. Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, pagu anggaran sebesar Rp. 1.112.915.000,- (satu milyar seratus dua belas juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.081.809.122,- (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus Sembilan ribu seratus dua puluh dua rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,21%;
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), pagu anggaran sebesar Rp. 1.684.800.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.684.800.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 100%;
- c. Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian ALat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran sebesar Rp. 2.490.732,000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.271.078.250,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 51,03%; dan
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, pagu anggaran sebesar Rp. 6.158.250.000,- (enam milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.662.900.000,-

(empat milyar enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 75,72%.

**12. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**, pagu anggaran sebesar Rp. 9.334.432.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.136.080.800,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu delapan ratus Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 44,31%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, pagu anggaran sebesar Rp. 9.334.432.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.136.080.800,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu delapan ratus Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 44,31%.

Besaran anggaran per program dan realisasi anggarannya sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Penunjang;

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000	92.539.600	97,41
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.810.245.074	5.462.934.008	94,02
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.473.500	278.898.900	98,73
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.335.000	454.055.140	98,85
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.406.500	309.091.500	99,90

2. Urusan Sosial;

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	234.000.000	234.000.000	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	2.014.450.000	1.883.087.750	93,48
3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	440.423.200	415.085.850	94,25

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.116.568.871	4.053.626.851	98,47
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	490.435.000	454.757.790	92,73
6	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	654.080.000	650.450.000	99,45

### 3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000	394.921.650	98,73
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	97.734.750	97,73
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	100
4	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.950.000	112.347.000	99,47
5	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	262.044.000	182.442.000	69,62
6	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000	69.570.000	90,58
7	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.800.000	150.886.500	99,40
8	Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	100
9	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	250.000.000	248.266.000	99,31
10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	600.000.000	600.000.000	100

#### 4. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	260.000.000	3.450.000	1,33
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	155.970.000	151.004.224	96,82
3	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.112.915.000	1.081.809.122	97,21
4	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.684.800.000	1.684.800.000	100
5	Pengendalian Dan Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	2.490.732.000	1.271.078.250	51,03
6	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6.158.250.000	4.662.900.000	75,72
7	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	9.334.432.000	4.136.080.800	44,31

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah urusan pemerintahan yang diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Dari 7 (Tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja sasaran yang terdiri dari 4 (Empat) indikator sasaran urusan bidang sosial, 1 (satu) indikator sasaran urusan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, 1 (Satu) indikator sasaran urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta 1 (satu) indikator sasaran urusan penunjang;
3. Dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran Dinas Sosial, PPKB, P3A Kabupaten Tasikmalaya, sebagian telah dapat menyamai capaian kinerja tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 12,5%, yang melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 37,5%, sisanya indikator kinerja sasaran ada yang tidak muncul kembali lalu ada yang belum keluar nilainya disaat tahun pelaporan serta ada yang pada tahun sebelumnya tidak ada menjadi ada;
4. Jumlah program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran sebanyak 12 (Dua Belas) program dengan 28 (Dua Puluh Delapan) kegiatan.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022**

No	IKU Perangkat Daerah	Satu an	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian IKU
1	2	3	5	6	7
1	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	66,94	57,96	86,58
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	100,00	100,00

4	Persentase PPKS yang Tertangani	%	4,13	4,13	100,00
5	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64,23	Belum keluar nilai dari BPS pusat	-
6	Rasio Akseptor KB	%	71,18	79,07	111,08
7	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	Poin	40,00	50,01	50,01
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>78.24</b>

#### 4.2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial;
2. Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
3. Belum optimalnya upaya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan program Bangga Kencana (*Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana*).

Strategi pemecahan masalah yang diupayakan oleh Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- 1) Mengoptimalkan layanan perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- 3) Mengupayakan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan program Bangga Kencana (*Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana*).



Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama periode tahun pelaporan.

Singaparna, Desember 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TASIKMALAYA



**DADAN WARDANA, S.IP, M.M.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690405 199603 1 002

## LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	BESAR ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>95.000.000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	4 Dokumen	75.000.000	DAU
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	6 Laporan	20.000.000	DAU
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5.810.245.074</b>	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	50 Orang/Bulan	5.810.245.074	DAU
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>282.473.500</b>	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Paket	25.000.000	DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Paket	60.000.000	DAU
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Dokumen	25.000.000	DAU
7	Penyediaan Bahan/Material	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Paket	33.832.000	DAU
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Laporan	35.500.000	DAU
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Laporan	103.141.500	DAU
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>459.335.000</b>	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Laporan	154.035.000	DAU
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Laporan	305.300.000	DAU
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>309.406.500</b>	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	118 Unit	254.858.500	DAU

13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	12 Unit	19.500.000	DAU
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Unit	35.048.000	DAU
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>234.000.000</b>	
15	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	39 Orang	234.000.000	DAU
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>2.014.450.000</b>	
16	Penyediaan Perumahan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	9150 Orang	1.330.800.000	DAU
17	Penyediaan Sandang	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1000 Orang	500.000.000	DAU
18	Penyediaan Alat Bantu	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	200 Orang	183.650.000	DAU
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>			<b>440.423.200</b>	
19	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	4023 Orang	163.000.000	DAU
20	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Shelter, 60 Orang	157.423.200	DAU
21	Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	300 Orang	120.000.000	DAU
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>4.116.568.871</b>	
22	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	858729 Keluarga	168.062.500	DAU
23	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	870 Keluarga	3.538.876.371	DAU
24	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	99 Orang	409.630.000	DAU
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			<b>490.435.000</b>	
25	Penyediaan Makanan	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1445 Orang	490.435.000	DAU
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>			<b>654.080.000</b>	

26	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	52 Orang	654.080.000	DAU
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>400.000.000</b>	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	400.000.000	DAU
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>100.000.000</b>	
28	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	100.000.000	DAU
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>350.000.000</b>	
29	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	29 Orang	350.000.000	DAU
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>112.950.000</b>	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	112.950.000	DAK
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>262.044.000</b>	
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	270 Layanan	262.044.000	DAK
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>76.806.000</b>	
32	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	270 Orang	76.806.000	DAK
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>151.800.000</b>	

33	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Laporan	151.800.000	DAU
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>150.000.000</b>	
34	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Layanan	150.000.000	DAU
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>250.000.000</b>	
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	250.000.000	DAU
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>600.000.000</b>	
36	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	54 Orang	600.000.000	DAU
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			<b>260.000.000</b>	
37	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Dokumen	260.000.000	DAU
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>155.970.000</b>	
38	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	10 Unit	155.970.000	DAK
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>			<b>1.112.915.000</b>	
39	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	10 Dokumen	140.015.000	DAK
40	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	1 Laporan	972.900.000	DAK

	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>			<b>1.684.800.000</b>	
41	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	4563 Orang	1.684.800.000	DAK
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2.490.732.000</b>	
42	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	41 Laporan	18.900.000	
43	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	3884 Orang	1.191.232.000	
44	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	40 Unit	1.265.000.000	DAK
45	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	40 Laporan	15.600.000	DAU
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>			<b>6.158.250.000</b>	
46	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	351 Kampung	6.158.250.000	DAK
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>9.334.432.000</b>	
47	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	771 Unit	620.132.000	DAK
48	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	286 Orang	250.000.000	DAU
49	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinsos, PPKB, P3A Kab. Tsm	39 Kelompok	8.464.300.000	DAK
<b>JUMLAH</b>				<b>38.557.116.145</b>	



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **DADAN WARDANA, S.IP, MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Tasikmalaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

- Nama : **H. ADE SUGIANTO**  
Jabatan : Bupati Tasikmalaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**H. ADE SUGIANTO**

Singaparna, Januari 2022  
Pihak Pertama,

  
**DADAN WARDANA, S.IP., MM**  
NIP. 19690405 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS SOSIAL, PPKB, P3A KABUPATEN TASIKMALAYA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	66,94 %
2.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %
3.	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %
4.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	4,13 %



5.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	64,23 Point
6.	Meningkatnya kepesertaan KB	Rasio akseptor KB	71,18 %
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	40,00 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.356.477.378	
2	Program Rehabilitasi Sosial	2.045.000.000	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.625.000.000	
4	Program Penanganan Bencana	1.210.000.000	
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	500.000.000	
6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	301.800.000	
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	850.000.000	
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	20.687.099.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>33.575.376.378</b>	

Singaparna, Januari 2022

Pihak Kedua,



**H. ADE SUGIANTO**

Pihak Pertama,



**DADAN WARDANA, S.IP., MM**  
NIP. 19690405 199603 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TIM PENYUSUN  
LKIP TAHUN 2022 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN  
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Dadan Wardana, S.IP, M.M	Penanggung jawab	
2.	dr. Hj. Eli Hendalia, M.H.Kes	Ketua	
3.	Windiawati, S.IP.	Sekretaris	
4.	Ita Agustia, S.IP	Anggota	
5.	Soni Robiansyah, S.IP	Anggota	
6.	Nadi, S.AP	Anggota	
7.	Lingga Trimadhona, SE	Anggota	